TUGAS 3 (TIGA)

GAGASAN BIROKRASI YANG EFEKTIF YANG SESUAI DENGAN HARAPAN

MASYARAKAT PADA UMUMNYA



NAMA : Dedi Ibrahim

NIM :021341848

UNIT PEMBELAJARAN JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA (UPBJJ UT) 2016.2

**GAGASAN BIROKRASI YANG EFEKTIF**

Berbicara tentang birokrasi ada baiknya jika kita mengetahui pengertian terlebih dahulu Birokrasi adalah asal kata dari Bureau, digunakan pada awal abad ke 18 di Eropa Barat bukan hanya untuk menunjuk pada meja tulis saja, akan tetapi lebih pada kantor, semisal tempat kerja dimana pegawai bekerja. Makna asli dari birokrasi berasal dari bahasa perancis berarti pelapis meja.  Kata birokrasi sendiri kemudian digunakan segera setelah Revolusi Perancis tahun 1789, dan kemudian tersebar ke negara lain.  Kata imbuhan -kratia berasal dari bahasa Yunani atau kratos yang berarti kekuasaan atau kepemimpinan.  Birokrasi secara mendasar berarti kekuasaan perkantoran ataupun kepemimpinan dari strata kepegawaian. Di Cina, dinasti Song (960 AD) sebagai contoh membentuk birokrasi sentralistis dengan staf berasal dari rakyat jelata yang terdidik.  Sistem kepemimpinan ini kemudian mendorong konsentrasi kekuasaan di dalam tangan kaisar dan birokrasi istana daripada yang diperoleh oleh dinasti sebelumnya.

Oleh karenanya Untuk dapat mewujudkan Birokrasi yang efektif peranan masyarakat sangat penting untuk dapat mewujudkan hal tersebut lontaran kitisi-kritisi terhadap pemerintah akan mampuh membuat Negara ini memilik birokrasi yang efektif . akan tetapi keefektivan pemerintah dan efisiensi tidak berjalan sebagaimana mestinya sedangkan untuk mendapatkan birokrasi yang efektif kedua hal tersebut perlu dijalankan secara bersamaan sehingga pemerintah mampu melaksanakan fungsinya yang kita kenal dengan istilah good governance,oleh karena itu perlu adanya pembuatan kerangka birokrasi yang mengandung unsur-unsur terciptanya

suatu sistem kerjasama serta pendekatan pelayanan publik yang lebih relevan bagi masyarakat.

   Birokrasi sebagai bagian terdepan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan di haruskan untuk tetap profesional dan tidak terkooptasi oleh kepentingan politik sehingga ia dapat menunjukkan postur ideal yang di harapkan publik. Liberalisasi politik sebagai akibat reformasi politik, di sisi lain memberikan godaan bagi birokrasi untuk bermain dalam ranah politik atau menciptakan ruang bagi munculnya politisasi terhadap birokrasi. Beberapa kasus di atas membuktikan bahwa birokrasi sulit sekali melepaskan dirinya dari ranah politik. Untuk itu diperlukan implementasi aturan yang lebih tegas, sanksi yang berat bagi pelanggaran yang dilakukan birokrasi.

Masyarakat adalah tumpuan yang dimana ketika pemerintah melakukam pelayanan atas warga negara yang harus memperoleh jaminan atas hak-haknya, Dalam hal ini revitalisasi birokrasi dan cara-cara menemukan kembali penataan sistem manajemen publik dalam mengantisipasi tuntutan untuk melayani sektor swasta serta rakyat pada umumnya menjadi crucial, Bukan jalan yang mudah untuk menciptakan sistem birokrasi efisien. Tetapi jalan pikiran yang sedang mengarah secara terencana ke arah upaya-upaya meningkatkan kemampuan birokrasi maupun swasta untuk mencapai pelayanan yang tinggi seperti ketepatan waktu, (delivery on time), keunggulan mutu produk (high quality of products), penunjang biaya untuk memperoleh pelayanan (cost reduction), serta perlakuan yang semakin menempatkan konsumen atau rakyat sebagai pihak yang memiliki martabat dan kedaulatan, semakin menemukan bentuknya. Modal yang paling mendasar adalah memenangkan kompetisi jasa masa depan, sebuah perlakuan yang menempatkan rakyat pada tingkat yang terhormat akan menjadi kekuatan yang penting. Oleh karena itu konsep teori sektor privat banyak diterapkan di sektor publik dengan memperhatikan aspek keadilan dan kesamaan .

Pelayanan publik yang baik merupakan salah satu indikator, apakah pemerintah sudah berhasil melaksanakan birokrari yang efektif atau belum. Saya berpendapat bahwa penerapan teknologi informasi pada layanan layanan publik pemerintah merupakan hal yang tepat. Dengan adanya penerapan teknologi informasi pada pelayanan publik maka masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi-informasi program, dan prosedur pelayanan. alah satu aspek budaya birokrasi yang sangat penting bagi keberhasilan reformasi birokrasi adalah budaya inovasi. Pada birokrasi pemerintah di Indonesia, inovasi ini belum menjadi nilai utama dari budaya birokrasi. Birokrasi yang inovatif merupakan prasyarat krusial dalam membangun pemerintahan  ke depan, Agar birokrasi efisien dan bertanggung jawab, maka perlu sistem yang inovatif. Salah satu critical sukses dari inovasi adalah perubahan yang konstan, atau constant renewel. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan merampingkan jalur birokrasi. Tak di pungkiri wajah birokrasi di Indonesia di penuhi dengan praktek yang biasa kita kenal dengan KKN hal tersebut sangat akan menghambat perkembangan birokrasi yang efektif bagi masyarakat .